

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam penelitian biasa, skripsi, tesis ataupun jurnal dan masih memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, adanya penelitian tersebut dapat mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Deki Eko Septianto, Strategi Pemerintah Dalam Optimalisasi Potensi Wisata Pantai Selatan Melalui Program Visit Kabupaten Malang, 2016	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Strategi pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pantai selatan melalui program visit kabupaten malang sebagai berikut: a. Pengembangan objek wisata dan daya tarik b. Membangun sarana dan prasarana c. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat d. Mengoptimalkan sarana informasi untuk promosi	Pada penelitian sekarang lebih memperdalam pada pantai Balekambang yang berada pada Jalur Lintas Selatan yang memiliki banyak aktor dalam pengelolaannya. Sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada peran pemerintah melalui program visit kabupaten Malang dengan

				pendataan objek wisata pantai selatan Kabupaten Malang yang berpotensi untuk dikembangkan.
2.	Muhammad Rifky Ramadhan, Pengembangan Objek Wisata Pantai Balekambang Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal, 2017	Observasi, wawancara, dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha</li> <li>b. Perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan</li> <li>c. Keberdayaaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran</li> <li>d. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal</li> </ul>	Pada penelitian sekarang lebih memperdalam pada aktor yang terlibat dalam pengelolaan Pantai Balekambang. Sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada pengembangan wisata untuk meningkatkan ekonomi lokal.
3.	Mukhamad Ali Mabruhi, Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang, 2017	Observasi, wawancara, analisis literatur, dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyedia infrastruktur ekonomi pengembangan wisata Pantai Balekambang</li> <li>b. Memelihara keberadaan wisata Pantai Balekambang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan Objek Daya Tarik Wisata Pantai Balekambang</li> <li>c. Menjaga stabilitas pengelolaan wisata</li> </ul>	Pada penelitian sekarang lebih memperdalam pada Pantai Balekambang yang berada pada Jalur Lintas Selatan yang memiliki banyak aktor dalam pengelolaannya. Sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada fungsi pemerintah

			Pantai Balekambang terkait perencanaan pengembangan destinasi Pantai Balekambang melalui pendekatan persepsi pasar, lintas batas, klaster kepariwisataan	dalam pengembangan destinasi pariwisata Pantai Balekambang.
--	--	--	--	---

Deki eko Septianto (2016) melakukan penelitian tentang Strategi Pemerintah Dalam Optimalisasi Potensi Wisata Pantai Selatan Melalui Program Visit Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pantai selatan melalui program visit kabupaten malang sebagai berikut:

- 1) Pengembangan objek wisata dan daya tarik
- 2) Membangun sarana dan prasarana
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat
- 4) Mengoptimalkan saran informasi untuk promosi

Muhammad Rifky Ramadhan (2017) melakukan penelitian tentang Pengembangan Objek Wisata Pantai Balekambang dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha adalah menciptakan produk baru yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata Pantai Balekambang, membuka kios, warung makanan dan minuman, cinderamata, oleh-oleh, lahan parkir yang dapat menyerap tenaga kerja.

2. Perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan mengembangkan fasilitas dan usaha-usaha pembenahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung seperti kios dan jasa toilet .
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran adalah produksi sendiri kerajinan asbak dari kulit kerang dan pemasaran kios yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar
4. Keberdayaan Kelembagaan Jaringan Kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal adalah kerjasama dengan perusahaan aquase dan perusahaan cat decofresh, telkomsel dengan mendirikan tower serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan objek wisata Pantai Balekambang.

Mukhamad Ali Maburi (2017) melakukan penelitian tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. penyedia infrastruktur ekonomi pengembangan wisata Pantai Balekambang diserahkan kepada PD. Jasa Yasa selaku Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal.
2. Memelihara keberadaan wisata Pantai Balekambang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan Objek Daya Tarik Wisata Pantai Balekambang dengan komponen attraction yaitu adanya pulau kecil sekitar 100 meter dari bibir pantai bernama Pulau Ismaya, aksesibilitas yaitu

adanya pembangunan jalur lintas selatan yang menghubungkan Pantai Sendang Biru dengan Pantai Balekambang, Amenitas yaitu fasilitas penunjang seperti caffe, penginapan, kios souvenir, makanan dan minuman, wahana, lokasi parkir.

3. Perencanaa Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Balekambang melalui pendekatan:
  - a. Pendekatan Persepsi pasar yaitu Pantai Balekambang menempati posisi terbanyak dalam hal jumlah pengunjung dibanding Pantai Ngliyep, Pemandian Dewi Sri, Pemandian Dewi Sri, Pemandian Sumber Waras, Pemandian Metro
  - b. Pendekatan lintas batas yaitu pengembangan spasial melalui kerjasama antar perum perhutani dengan PD. Jasa Yasa karena pada dasarnya lahan di Pantai Balekambang merupakan lahan perum perhutani.
  - c. Pendekatan Klaster Kepariwisataaan yaitu terdapat 4 unsur dalam klaster pariwisata antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata budaya

## **B. Administrasi Publik**

Kata “administrasi” berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Menurut The Liang Gie dalam Syafiie (2006:14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Menurut Syafiie (2006:18) arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Penjelasan diatas dapat didukung menurut Nicholas Henry dalam Indradi (2006:116) bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efesiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Indradi (2006:85) pendekatan dalam ilmu administasi salah satunya yaitu pendekatan manajemen ilmiah (*Scientific Management Approach*). Pendekatan ini diakui muncul tahun 1856 hingga tahun 1991 yang dipelopori oleh Friedrich Winslow Taylor yang dikenal sebagai bapak ilmu manajemen dalam bukunya berjudul "*Priciple Acientific Management*" yang terbit tahun 1911. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor ada 6 yaitu :

1. *Time study principle* (prinsip studi waktu) yaitu untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu
2. *Differential piece-rate system* (sistem diferensiasi hasil upah) menentukan upah lebih kepada pekerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan dibawah standart waktu yang telah ditentukan.
3. *Separation of planning from performance principle* (prinsip pemisahan antara perencanaan dengan pelaksanaan) yaitu penegasan bahwa perencanaan hanya dilakukan oleh administrator dan manajer yang dapat menjelaskan suatu pekerjaan harus dilaksanakan dan bukan oleh para pelaksana.
4. *Scientific method of work principle* (prinsip metode kerja ilmiah) yaitu produksi dan melatih pekerja.
5. *Managerial control principle* (prinsip kontrol manajerial) yaitu perlunya pemahaman para manajer tentang prinsip manajemen kontrol untuk diterapkan dalam setiap aktivitas pekerjaannya.
6. *Functional management principle* (prinsip manajemen fungsional) yaitu perlunya pemakaian bentuk organisasi garis (lini) dengan modifikasi dan penyesuaian model yang memungkinkan terwujudnya koordinasi diantara masing-masing bekerja dan bidang pekerjaan.

Dapat kita simpulkan dari pengertian di atas bahwa dalam pendekatan ilmu administasi salah satunya yaitu ada pendekatan manajemen ilmiah yang berarti bahwa dalam mempelajari ilmu administrasi publik pasti berhubungan

dengan manajemen karena dengan adanya manajemen dapat mengarahkan dan mengatur sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi publik yang diwujudkan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian.

### **C. Kolaborasi**

#### 1. Konsep Kolaborasi

Menurut Wanna (2008) dalam Sabaruddin (2015:25) kolaborasi yaitu bekerja bersama atau bekerjasama dengan pihak lain. Ini berarti para aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama di beberapa usaha. Kolaborasi dalam bahasa Inggris berarti *collaboration* yang dikembangkan pada abad ke-19 akibat dari berkembangnya industrialisasi, organisasi yang semakin kompleks dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat.

Rilley dalam Sabaruddin (2015:26) mendefinisikan kolaborasi merupakan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi non pemerintah (yang *concern* dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah. Dalam relasi tersebut keduanya bertindak bersama-sama dalam desain dan implementasi pengembangan program. Bentuk interaksi keduanya tidak sekedar perjanjian dua organisasi yang terlibat untuk bekerjasama antara *non government organization* (NGO) dan lembaga pemerintah tetapi saling mengakui dan berpartisipasi aktif.

Hogue dalam Sabaruddin (2015:25) menjelaskan sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi *collaboration* berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk



ketergantungannya. *Coordination* dan *cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam *coordination* dan *cooperation* bersifat independen. Pada *collaboration*, seluruh pihak bekerjasama dan membangun *concensus* untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karena itu kolaborasi bersifat dinamis dan saling tergantung (interdependen). Sebagai konsep dinamis, kolaborasi merupakan proses yang bersifat inkremental dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

- 1) Pengembangan visi kolaborasi yang menjelaskan kepentingan bersama,
- 2) Pendekatan visi dalam bentuk penyamaan pemahaman dalam bentuk prinsip bagaimana *stakeholder* bekerja.
- 3) *Appreciative inquiry* yaitu alat untuk mencari cara yang lebih baik, efektif, dan konstruktif yang meliputi *discovery* yaitu berkaitan dengan menemukan yang terbaik, *Dream* berkaitan dengan visi yang ingin dihasilkan, *Design* berkaitan dengan apa yang dapat diperbuat, *deliver* yaitu bagaimana desain diterapkan atau dilaksanakan.

Kerjasama kolaboratif menurut Dwiyanto (2010:260) masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan organisasi sektor privat. Berdasarkan pendapat

diatas kolaborasi adalah suatu kerjasama yang melibatkan antara organisasi publik dengan non publik yang saling ketergantungan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Joan M. Roberts diterjemahkan oleh peneliti (2004: 27-28) terdapat matriks strategi untuk bekerja bersama yaitu :

<b>Jenis Hubungan</b>	<b>Definisi</b>	<b>Hubungan</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Sumber Daya</b>	<b>Bentuk Organisasi</b>
• Jaringan	• Bertukar informasi untuk saling menguntungkan	• Informal	• Komitmen waktu minimal; Tingkat kepercayaan yang terbatas; Tidak perlu untuk berbagi wilayah; Pertukaran informasi adalah fokus utama	• Tidak perlu saling berbagi sumber daya yang diperlukan	• Tidak diperlukan organisasi
• Koordinasi	• Bertukar informasi untuk saling menguntungkan, pertukaran kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama.	• Formal	• Komitmen waktu sedang; Tingkat kepercayaan sedang; Tidak perlu untuk berbagi wilayah; Membuat akses ke layanan atau sumber daya lebih ramah pengguna adalah fokus utama	• Tidak ada atau minimal saling berbagi sumber daya yang diperlukan	TS Sumber daya atau manajemen proyek dibagikan
• Bekerjasama	• Bertukar informasi untuk saling menguntungkan; pertukaran kegiatan dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama	• Formal	• Komitmen waktu yang substansial; Tingkat kepercayaan yang tinggi; Akses yang signifikan ke wilayah masing-masing, berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama adalah fokus utama	• Saling berbagi sedang hingga luas sumber daya dan sebagian resiko, tanggung jawab dan imbalan	TS
• Berkolaborasi	• Bertukar informasi untuk saling menguntungkan; pertukaran kegiatan; Berbagi sumber daya; dan meningkatkan kapasitas yang lain untuk mencapai tujuan bersama	• Formal	• Komitmen waktu yang luas; Tingkat kepercayaan yang sangat tinggi; luas wilayah bersama; saling meningkatkan kapasitas satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama adalah fokus utama	• Pembagian penuh sumber daya dan pembagian penuh resiko, tanggung jawab, dan imbalan	TS

#### **D. Manajemen Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan (manajemen) menurut Leiper dalam Pitana dan Diarta (2009:80) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Directing* (Mengarahkan)
3. *Organizing* (termasuk koordinasi)
4. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Leiper (1990) dalam Pitana dan Diarta (2009:80) menekankan bahwa koordinasi merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus dipisahkan dan memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi merujuk kepada fungsi seorang manajer untuk menerjemahkan sebuah informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan pengarahan (*directing*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*).

##### **1. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Fennel (2003) dalam

Pitana dan Diarta (2009:81) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Pembangunan dan Pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Fluker (2004) dalam Pitana dan Diarta (2009:86) yang harus dicakup dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep *values tourism* yang diluncurkan tahun 1995 oleh *The Pacific Asia Travel Association* (PATA) yaitu :

- a. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan)

- b. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional negara bersangkutan
- c. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan
- d. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata
- e. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Menurut Fluker (2004) dalam Pitana dan Diarta (2009:86) pemangku kepentingan yang dimaksud adalah :

- 1) *Staff* dari industri pariwisata
- 2) Konsumen
- 3) *Investor* dan *Developer*
- 4) Pemerhati dan penggiat lingkungan
- 5) Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya
- 6) Masyarakat tuan rumah
- 7) Pemerintah
- 8) Pelaku ekonomi lokal dan nasional

## 2. Metode Pengelolaan Pariwisata

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut menurut Fluker (2004) dalam Pitana dan Diarta (2009:88) :

a. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan

Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, penjajakan dan survei, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan, dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.

b. Pengidentifikasi isu

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata misalnya :

- 1) Penyebaran dan ketimpangan pendapatan antar wilayah,
- 2) Pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi
- 3) Investasi termasuk akses kepada modal dan investasi asing
- 4) Kompetisi internasional dan pemantauan pasar
- 5) Promosi pariwisata
- 6) Riset dan statistik pariwisata
- 7) Pendidikan dan pelatihan pariwisata

- 8) Dampak pariwisata
- 9) Regulasi pemerintah, pajak, hubungan industrial
- 10) Kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat khusus seperti pariwisata pedesaan, ekowisata.

c. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini menjadi tuntutan bagi pelaku wisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus

Agan ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agan ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata, dan mendorong pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.

e. Penyediaan fasilitas dan operasi

Hal ini terutama berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberi modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.

f. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif

Hal ini terutama diperlukan sebagai prasyarat bagi organisasi/ perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat



Hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.

## **E. Pariwisata**

### **1. Definisi Pariwisata**

Secara etimologis kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu kata “pari” dan wisata. Pari yaitu berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata yaitu perjalanan dan berpergian. Menurut Yoeti (1985:109) berpendapat bahwa :

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Sedangkan menurut Wahab dalam Yoeti (1985:107) adalah :

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beranekaragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang hanya dalam waktu sementara yang telah direncanakan untuk memenuhi keinginannya atau mencari kepuasan yang beranekaragam.

### **2. Potensi Wisata**

Menurut Sumihardjo (2008:12) yang dimaksud dengan potensi adalah segala sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pendit (2005:21) menyatakan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu sumber daya yang terdapat di sebuah objek wisata untuk dikembangkan agar menjadi daya tarik para wisatawan.

### 3. Daya Tarik atau Objek Wisata

Daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan pariwisata. Sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara itu yang disebut dengan daya tarik atau atraksi wisata. Menurut Suwanto (2004:19) bahwa daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh sebab itu menurut Sammeng (2001:31-32) objek daya tarik wisata ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu objek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

- a. Objek wisata alam misalnya laut, pantai, gunung, danau, sungai, fauna (langka), flora (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dll.
- b. Objek wisata budaya misalnya upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), perkawinan adat, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, adat-istiadat, museum, dll.

- c. Objek wisata buatan misalnya sarana dan fasilitas olahraga, hiburan, taman rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, dll.

Menurut Yoeti (1985:164) suatu objek pariwisata harus memenuhi 3 kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung yaitu :

1. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”, artinya ditempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan perkataan lain daerah itu harus mempunyai daya tarik khusus, disamping itu ia harus mempunyai pula atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “*entertainments*” bila orang datang kesana.
2. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to do*” artinya ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan harus pula disediakan fasilitas rekreasi atau *amusements* yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat itu.
3. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*” artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*) terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

#### 4. Sarana dan Prasarana pariwisata

Pariwisata tidak akan berkembang jika sarana dan prasarana pariwisata kurang mendukung atau kurang memadai. Adanya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai dalam suatu objek wisata dapat memberikan nilai lebih pada objek wisata tersebut.

a. Sarana Pariwisata

Menurut Wahab dalam Yoeti (1985:179) sarana pariwisata adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak selamanya tergantung pada wisatawan. Menurut pengertian ini tanpa kedatangan wisatawan, perusahaan tersebut tetap hidup, karena masyarakat setempat juga membutuhkannya. Menurut Yoeti (1985:184-188) membagi tiga bagian penting sarana pariwisata yaitu :

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructures*)

Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan pariwisata. Pada dasarnya perusahaan tersebut merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk dalam kelompok ini adalah

- a) Travel agent dan tour operator
- b) Perusahaan-perusahaan angkutan wisata
- c) Hotel dan akomodasi lainnya
- d) Bar dan restoran serta rumah makan lainnya
- e) Objek wisata dan atraksi wisata

2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructures*)

Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting

adalah untuk membuat agar para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a) Sarana olahraga seperti: lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan bowling, daerah perburuan, berlayar, dan berselancar.
  - b) Sarana ketangkasan seperti: permainan bilyard, jackpot, pachino dan *amusement* lainnya
3. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Super-structures*)

Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a) *Night Club*
- b) *Steambaths*
- c) *Casinos*

b. Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1985:170) yang dimaksud prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pendapat lain dari Suwanto (2004:21) menjelaskan bahwa prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan

sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Menurut Wahab dalam Yoeti (1985:178) membagi prasarana (*infrastructures*) dalam tiga bagian penting yaitu :

- 1) Prasarana Umum yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak (umum) yang pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran roda perekonomian. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
  - a) Pembangkit tenaga listrik dan sumber energi lainnya
  - b) Sistem penyediaan air bersih
  - c) Sistem jaringan jalan raya dan jalan kereta api
  - d) Sistem irigasi
  - e) Perhubungan dan telekomunikasi
- 2) Kebutuhan masyarakat banyak yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah rumah sakit, apotik, bank, kantor pos, pompa bensin, administrasi pemerintahan (polisi, pengadilan, pemerintahan umum dan badan legislatif lainnya).
- 3) Prasarana Kepariwisataaan
  - a. *Receptive Tourist Plant* yaitu segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan

kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk adalah :

- 1) Perusahaan yang kegiatannya adalah merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi orang yang melakukan perjalanan wisata. Contohnya adalah *travel agent* dan *tour operator*.
  - 2) Badan atau organisasi yang memberikan penerangan, penjelasan, promosi tentang suatu daerah tujuan wisata. Contohnya *tourist information centre*.
- b. *Residential Tourist Plant* yaitu semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang diperuntukan bagi wisatawan, termasuk segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Contohnya hotel, wisma, *cottages*, *home stay*, rumah makan, restoran, *cafeteria*, *coffe shop*, dll.
- c. *Recreative and Sportive Plant* yaitu semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah fasilitas main sky (laut), kolam renang, perahu layar, berselancar, memancing, dll.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pariwisata merupakan sesuatu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat atau wisatawan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata.

Dengan adanya sarana dan prasarana wisata akan memudahkan para wisatawan yang sedang melakukan kegiatan pariwisata.

#### **F. Teori Jaringan Aktor**

Menurut Sukmi (2015:210) teori jaringan aktor atau *Actor Network Theory* merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa segala sesuatu hidup dalam sebuah jaringan. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Teori ini bersifat multidisipliner antara ilmu-ilmu sosial dan studi teknologi. *Actor Network Theory* lahir dari pemikiran Bruno Latour (lahir 1947), seorang sosiologi dan antropologi Perancis. *Actor Network Theory* berpandangan bahwa masyarakat tidak hanya terdiri dari individu-individu dan norma-norma sosial namun juga hidup dalam sebuah jaringan sehingga masyarakat bukan hanya relasi antar subjek yang hidup saja, namun hasil sebuah interaksi yang saling mempengaruhi antara subjek yang hidup maupun yang mati. Dalam teori ini ada beberapa posisi sentral yang dibahas yaitu :

1. Aktor

Aktor dipahami sebagai pelaku. Aktor dalam melakukan sebuah aksi tidak dapat lepas dari peranan aktor lain.

2. Jaringan aktor atau pelaku

Jaringan adalah jala atau rangkaian. Misalnya admin kampus, dosen, atau mahasiswa semua akan menggunakan prosesor. Semua faktor akan menjadi sebuah jaringan yang terhubung satu dengan yang lain. Ketika ada



proses belajar mengajar semua faktor tersebut akan terkait satu dengan yang lain dan disebut jaringan aktor.

### 3. Aktan

Aktan adalah aktor pengendali atau aktor yang dapat mengendalikan aktor yang lain. *Actor Network Theory* tidak berupaya mencoba untuk menjawab pertanyaan mengapa ada sebuah jaringan. Namun lebih fokus pada infrastrukturnya. Prinsip yang dipakai adalah *principle of Generated Symetry* yaitu prinsip yang beranggapan bahwa manusia dan bukan manusia akan digabungkan dalam framework konseptual yang sama.. Sehingga baik manusia atau bukan dapat berdiri sebagai aktan